

Dilematika Gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda dalam Perspektif Pemaknaan Arsitektur dan Fungsionalisme

Pandu K. Utomo¹⁾, Kenan Dimas Prasajo¹⁾, Farel Sulisthio¹⁾, Arya Rizqi Putra Mahardika¹⁾

¹⁾ Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman
E-mail: pandukutomo@ft.unmul.ac.id

ABSTRAK

Bangunan publik yang dirancang sebagai ruang budaya seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai simbol identitas lokal, tetapi juga sebagai pusat aktivitas kultural yang aktif dan inklusif. Penelitian ini mengkaji fenomena penyimpangan fungsi ruang pada bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda, dan menganalisis fenomena penyimpangan fungsi tersebut dengan pendekatan yang berfokus pada pengalaman hidup (*lived experience*) dan persepsi makna ruang. Temuan menunjukkan bahwa terdapat banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsinya, berkurangnya pemaknaan arsitektur publik sebagai bagian dari wadah berinteraksi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa ruang-ruang yang digunakan untuk kegiatan non-kultural seperti pesta pernikahan dan acara sekolah tidak merepresentasikan penekanan budaya Kalimantan Timur. Selain itu, lemahnya pengelolaan, tidak adanya kebijakan pemanfaatan ruang yang tegas, serta rendahnya partisipasi masyarakat menegaskan bahwa ruang budaya tidak cukup hanya ditopang oleh desain simbolik, melainkan harus diimbangi dengan tata kelola yang konsisten dan partisipatif. Rekomendasi diberikan dalam bentuk revitalisasi program budaya, pembenahan sistem pengelolaan, serta optimalisasi desain fisik untuk mendukung fleksibilitas dan keberlanjutan aktivitas budaya.

Kata Kunci: ruang budaya, fungsionalisme, desain arsitektur, pemaknaan, Samarinda

ABSTRACT

Public buildings designed as cultural spaces should not only function as symbols of local identity, but also as active and center of cultural activity. This research examines the phenomenon of deviation in the function of space in the building of the Samarinda City Culture and Tourism Office, then analyzes the phenomenon of deviation in function with an approach that focuses on lived experience and perception of the meaning of space. This study finds that there is a lot of space utilization that is not in accordance with its function, reducing the meaning of public architecture as part of a place to interact. The analysis also shows that spaces used for non-cultural activities such as weddings and school events do not represent the cultural emphasis of East Kalimantan. In addition, weak management, the absence of strict space utilization policies, and low community participation confirm that cultural spaces are not sufficiently supported by symbolic design, but must be balanced with consistent and participatory governance. The recommendations are given in the form of revitalization of cultural programs, improving the management system, and optimizing physical design to support the flexibility and sustainability of cultural activities.

Keyword : cultural space, functionalism, architectural design, interpretation, Samarinda

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam kerangka arsitektur, bangunan publik dipahami bukan semata sebagai wadah fisik, melainkan sebagai tempat yang memperkaya pengalaman, memberi kesempatan berinteraksi, dan menjadi wadah ekspresi identitas (Hantono and Pramitasari 2018; Tamariska and Ekomadyo 2017). Ruang-ruang ini berfungsi sebagai wadah memfasilitasi kegiatan sosial-budaya dan kesenian. Keberadaannya merupakan upaya untuk hadir dan membangun dialog antara masa lalu, kini, dan masa depan. Kota Samarinda sebagai episentrum budaya Kalimantan Timur, memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan ruang semacam ini. Kompleks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara ideal dirancang untuk memikul peran

simbolik dan fungsional sebagai jantung denyut kehidupan budaya kota, sebuah fasilitas yang memancarkan makna dan mengkatalisasi kebanggaan lokal.

Berdasarkan perkembangannya, fungsi bangunan gedung Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda bergeser dari yang sebelumnya menjadi wadah untuk keiatan dan inovasi kebudayaan, menjadi ruang-ruang yang tidak efektif. Ruang yang seharusnya dapat menampilkan seni dan tradisi, ruang budaya, dan media edukasi dan pertukaran nilai antara generasi kini menunjukkan realitas yang bertolak belakang. Banyak ruang dalam kompleks bangunan tersebut justru digunakan untuk kegiatan non-kultural, seperti acara perpisahan sekolah, pesta pernikahan, hingga latihan tari modern. Aktivitas-aktivitas ini cukup sering berlangsung dan seolah menjadi praktik yang diterima secara umum, padahal tidak selaras dengan tujuan awal perencanaan dan pendirian bangunan. Bahkan, sebuah gedung khusus yang dirancang untuk kegiatan budaya seperti pertunjukan seni dan pameran, hanya dibuka sesekali untuk kegiatan formal pemerintah, dan sebagian besar waktunya dibiarkan tidak terpakai.

Fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor, baik dari sisi desain arsitektur, pengelolaan ruang, maupun kebutuhan sosial masyarakat. Tidak adanya pedoman atau kebijakan yang tegas mengenai pemanfaatan ruang menyebabkan ruang-ruang tersebut dapat disewa atau digunakan tanpa mempertimbangkan relevansi dengan fungsi budaya. Selain itu, lemahnya keberadaan program budaya yang konsisten menyebabkan masyarakat tidak melihat bangunan ini sebagai pusat kegiatan budaya yang hidup. Kondisi ini menjadi refleksi atas tantangan besar yang dihadapi dalam menciptakan ruang publik yang tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga bermakna secara simbolik dan sosial. Apabila arsitektur gagal membentuk perilaku yang selaras dengan tujuan ruang, maka akan terjadi kekosongan makna yang menyebabkan penyimpangan fungsi (Pratiwi 2016). Oleh karena itu, kajian ini sangat relevan untuk menggali bagaimana desain dan tata kelola dapat dioptimalkan agar ruang budaya benar-benar menjadi katalisator pertumbuhan identitas dan kebanggaan lokal.

Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana desain arsitektur dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis. Proses partisipatif dalam perencanaan dan desain ruang publik harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan melibatkan mereka dalam setiap tahap mulai dari konsep hingga implementasi (Prabowoningsih et al. 2018). Pendekatan ini akan membantu memastikan bahwa ruang-ruang tersebut dapat berfungsi sebagai tempat berkumpul yang merayakan keberagaman budaya dan tradisi lokal, serta mendorong interaksi sosial yang positif. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan yang jelas dan tegas mengenai penggunaan ruang, serta program-program budaya yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penyelenggaraan acara rutin, pameran seni, dan kegiatan edukatif yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, kompleks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak hanya akan menjadi bangunan fisik, tetapi juga pusat kehidupan budaya yang aktif dan dinamis dan bertanggung jawab terhadap pemanfaatan ruangnya.

Dari perspektif arsitektur, bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat diinterpretasikan sebagai simbol identitas budaya yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Samarinda. Desain arsitektur yang diusung seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek estetika, tetapi juga konteks sosial dan budaya yang melatarbelakanginya. Elemen-elemen desain, seperti penggunaan material lokal, bentuk yang terinspirasi dari tradisi setempat, dan integrasi dengan lingkungan sekitar, dapat memperkuat makna simbolik bangunan tersebut (Afdholi 2017; Sari et al. 2022; Wardiningsih and Salam 2019). Dengan demikian, arsitektur tidak hanya berfungsi sebagai wadah fisik, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan narasi budaya yang kaya dan kompleks, yang dapat menginspirasi generasi mendatang untuk menghargai dan melestarikan warisan budaya mereka.

Dalam konteks fungsionalisme, bangunan ini harus dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan masyarakat secara keseluruhan. Fungsionalisme menekankan bahwa bentuk bangunan harus ditentukan oleh fungsinya (Hidayat 2019). Oleh karena itu, setiap elemen desain harus dirancang untuk mendukung aktivitas yang diharapkan terjadi di dalamnya. Dalam hal ini, kompleks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu menyediakan ruang yang fleksibel dan adaptif untuk berbagai kegiatan budaya, edukasi, dan sosial. Jika ruang-ruang tersebut tidak dirancang dengan mempertimbangkan fungsi yang jelas, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara desain dan penggunaan, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan awal perencanaan (Mustaqim, Adiwijaya, and Indrajaya 2013; Titisari, Santoso, and Suryasari 2012). Oleh karena itu, penerapan prinsip fungsionalisme dalam desain dan pengelolaan ruang sangat penting untuk memastikan bahwa bangunan ini dapat berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi Masyarakat (Islamiyati, Suprayetno, and Rambe 2021).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena penyimpangan fungsi ruang dari perspektif desain dan perilaku pengguna. Lokasi penelitian dilakukan pada bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda, yang menjadi kasus utama dalam pengamatan ini.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap kondisi ruang, tata guna ruang, serta aktivitas yang berlangsung di dalam bangunan. Selain itu, wawancara dilakukan secara mendalam pada narasumber yaitu pekerja di bangunan tersebut. Melalui metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman menyeluruh tentang bagaimana ketidaksesuaian fungsi dapat terjadi, dan sejauh mana desain serta pengelolaan ruang turut andil dalam membentuk pola penggunaan yang menyimpang dari fungsi awal.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh, ditemukan sejumlah temuan utama yang mencerminkan terjadinya ketidaksesuaian fungsi ruang pada bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda. Temuan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara fungsi ideal sebagaimana yang direncanakan dalam konsep awal perancangan bangunan dengan praktik pemanfaatan ruang yang terjadi di lapangan. Bangunan yang seharusnya menjadi pusat aktivitas budaya, edukasi, dan pelestarian nilai-nilai lokal justru mengalami pergeseran fungsi yang signifikan. Dalam praktiknya, banyak ruang yang digunakan untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kebudayaan, dan hanya sedikit aktivitas yang mendukung penguatan identitas budaya daerah. Hal ini mengindikasikan adanya persoalan yang tidak hanya terkait desain dan infrastruktur fisik, tetapi juga menyangkut aspek manajemen ruang, partisipasi masyarakat, serta kesadaran kolektif terhadap pentingnya ruang budaya dalam kehidupan

A. Aktivitas Tak Sesuai Fungsi Bangunan

Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda, yang secara konseptual dan arsitektural dirancang sebagai representasi fisik serta wahana aktif kebudayaan daerah, mengalami distorsi fungsi yang signifikan dalam operasional sehari-hari. Ruang utamanya, khususnya aula serbaguna, justru lebih sering dialihfungsikan menjadi venue untuk beragam kegiatan komersial dan sosial yang minim relevansi dengan misi pelestarian budaya. Acara seperti pesta pernikahan dengan konsep modern, perpisahan sekolah berskala besar, rapat organisasi kemasyarakatan umum, hingga pelatihan keterampilan generik telah mendominasi kalender pemakaian ruang. Fenomena ini tidak hanya bersifat insidental, melainkan telah menjadi pola yang mengindikasikan pergeseran prioritas. Akibatnya, identitas bangunan sebagai ruang budaya yang representatif semakin kabur, tergantikan oleh persepsi publik sebagai fasilitas serbaguna yang tersedia untuk disewa. Frekuensi dan ragam aktivitas non-budaya ini secara substantif menggerus makna simbolik yang melekat pada institusi tersebut.

Penyimpangan fungsi ini secara fundamental dapat ditelusuri pada dua faktor pendorong utama: insentif ekonomi dan pertimbangan kepraktisan akses. Dari sisi pengelola, terdapat kecenderungan kebijakan yang memprioritaskan pemanfaatan ruang secara maksimal dan optimalisasi pendapatan sewa, seringkali tanpa disertai mekanisme kurasi yang ketat untuk menjamin kesesuaian aktivitas dengan visi kebudayaan. Kebijakan pragmatis ini mengorbankan fungsi simbolik dan edukatif bangunan. Di sisi pengguna, fasilitas ini menjadi pilihan utama karena dianggap menawarkan kemudahan prosedur administratif, fleksibilitas jadwal, ketersediaan ruang yang memadai, dan biaya yang relatif kompetitif jika dibandingkan dengan alternatif venue lain yang mungkin memiliki regulasi lebih ketat atau tarif lebih tinggi. Kombinasi antara insentif ekonomi bagi pengelola dan kemudahan akses bagi pengguna ini menciptakan siklus yang secara sistematis meminggirkan fungsi budaya asli bangunan.

Lebih jauh, masalah ketidaksesuaian fungsi ini tidak terbatas pada ruang interior, melainkan juga meluas ke area ruang terbuka di sekitar kompleks bangunan. Ruang luar yang seharusnya menjadi area pendukung aktivitas budaya atau ruang interaksi budaya yang informal, justru sering kali digunakan untuk kegiatan hiburan dan rekreasi massal yang bersifat umum dan tidak terikat pada nilai-nilai khas lokal. Contoh nyata termasuk penyelenggaraan lomba musik populer, pentas hiburan komersial, atau kegiatan olahraga komunitas yang tidak memiliki korelasi dengan upaya pelestarian atau pengembangan seni-

budaya Kalimantan Timur. Ruang luar pun gagal menjadi ekstensi yang memperkuat narasi kebudayaan yang ingin dibangun.

Aspek paling kontradiktif dan ironis dalam fenomena ini adalah nasib gedung khusus budaya yang terdapat di dalam kompleks tersebut. Gedung yang secara eksplisit dirancang dengan spesifikasi teknis (akustik, panggung, pencahayaan, galeri) untuk mendukung pertunjukan seni, pameran budaya, atau forum diskusi kebudayaan, justru menjadi ruang yang paling jarang dimanfaatkan sesuai kapasitasnya. Pengoperasiannya sangat terbatas, hanya diaktifkan pada momen-momen tertentu yang bersifat formal dan seremonial, seperti peringatan hari besar nasional, peluncuran program resmi pemerintah daerah, atau kunjungan tamu penting. Di luar agenda-agenda terbatas ini, gedung khusus tersebut dalam kondisi terkunci dan tidak dapat diakses oleh publik luas, komunitas seniman lokal, atau kelompok budaya yang seharusnya menjadi pengguna utamanya. Kondisi ini juga menciptakan kesan eksklusivitas dan elitisasi yang bertolak belakang dengan semangat inklusivitas dan vitalitas yang seharusnya melekat pada sebuah pusat kebudayaan. Fasilitas unggulan ini justru menjadi simbol fisik dari disfungsi dan kesenjangan antara konsep ideal dengan praktik pengelolaan.

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara potensi desain fisik yang sudah mengarah ke representasi budaya, dengan praktik penggunaan ruang yang cenderung menjauh dari nilai-nilai tersebut. Tanpa upaya pengelolaan yang lebih selektif dan arah kebijakan yang konsisten, ruang budaya akan terus mengalami pergeseran fungsi yang tidak sesuai dengan tujuan perancangannya.



Gambar 1. Gedung Dekat Parkiran

B. Minimnya Aktivitas dan Program Budaya

Ketiadaan program budaya yang terstruktur, terencana, dan berkelanjutan merupakan faktor krusial yang menghambat fungsi optimal Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda. Secara konseptual, sebuah ruang budaya tidak sekadar memerlukan kehadiran fisik yang memadai, tetapi lebih mendasar lagi membutuhkan aktivitas yang berkesinambungan untuk menjadi entitas yang hidup dan bermakna. Aktivitas-aktivitas seperti pertunjukan seni tradisional secara berkala (misalnya, bulanan atau mingguan), forum diskusi kebudayaan yang mendalam, workshop keterampilan seni lokal yang partisipatif, atau pameran karya seniman daerah merupakan elemen vital yang membentuk denyut nadi ruang tersebut. Program semacam inilah yang sebenarnya menjadi inti yang mampu menjalin keterlibatan aktif masyarakat, memfasilitasi transmisi nilai antargenerasi, dan pada akhirnya memastikan keberlangsungan budaya lokal. Tanpa program yang dirancang secara sistematis dan dijalankan secara konsisten, bangunan fisik hanyalah cangkang kosong yang kehilangan rohnya.

Kondisi yang teramati di Samarinda secara nyata menunjukkan defisit dalam hal agenda kegiatan yang tetap dan terprediksi. Tidak adanya jadwal yang jelas dan rutin untuk aktivitas kebudayaan di dalam kompleks menyebabkan ruang-ruang potensial berada dalam kondisi pasif dan kurang termanfaatkan sesuai kapasitas dan tujuannya. Pasivitas ruang ini bukan tanpa konsekuensi; ia berdampak langsung pada menurunnya minat dan frekuensi kunjungan masyarakat. Publik cenderung tidak melihat alasan kuat untuk datang atau berinteraksi dengan bangunan tersebut, karena tidak ada daya tarik berkelanjutan atau event horizon yang diantisipasi secara rutin. Ruang yang sunyi dan jarang kegiatan secara perlahan menghilangkan kesan bahwa tempat ini merupakan pusat kebudayaan yang layak dikunjungi, memperkuat persepsi ketidakrelevansiannya dalam kehidupan budaya sehari-hari warga.

Lebih jauh, fenomena minimnya program ini mengindikasikan kegagalan institusi dalam menjalankan peran strategisnya sebagai pusat kebudayaan yang aktif. Ruang-ruang yang secara arsitektural disiapkan sebagai wadah pengembangan kreativitas, pembelajaran budaya, dan ekspresi seni lokal, pada praktiknya

hanya berfungsi sebagai elemen fisik yang statis atau hanya dipakai untuk fungsi sekunder. Kondisi ini mencerminkan masalah mendasar pada tingkat manajemen, yaitu belum terciptanya sistem pengelolaan program budaya yang visioner, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Sistem manajemen yang ideal seharusnya mampu merancang kurasi kegiatan yang tidak hanya merespons kebutuhan masa kini, tetapi juga secara proaktif mendorong dinamika, inovasi, dan regenerasi kebudayaan lokal. Tanpa sistem pengelolaan program yang dinamis dan berjejaring dengan komunitas, potensi besar ruang fisik tersebut untuk menjadi katalisator kebudayaan tetap tidak tergalai.

Minimnya aktivitas kultural yang bermakna di dalam bangunan ini tidak hanya bermuara pada stagnasi pemanfaatan ruang, tetapi juga mengungkapkan disintegrasi atau ketidakselarasan antara desain arsitektural dan visi kebudayaan yang hendak diwadahi. Simbol-simbol budaya yang mungkin telah dihadirkan melalui ornamen, tata ruang, atau pilihan material menjadi kehilangan signifikansi aktualnya ketika tidak disertai dengan konten kegiatan yang menghidupkan simbol-simbol tersebut. Tanpa praktik budaya yang berkesinambungan di dalamnya, narasi simbolik yang ingin disampaikan melalui arsitektur menjadi terputus dan tidak terhubung dengan pengalaman nyata pengguna. Akibatnya, terjadi dekontekstualisasi di mana bentuk fisik bangunan gagal menjalin dialog yang bermakna dengan substansi budaya yang seharusnya dirawat dan dikembangkan di dalamnya.

Oleh karena itu, upaya revitalisasi fungsi bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda harus dimulai dari fondasi yang paling mendasar: pembentukan sistem perencanaan dan pelaksanaan program budaya yang jelas, konsisten dalam pelaksanaan, dan inklusif (terbuka untuk partisipasi luas masyarakat umum dan komunitas budaya). Kehadiran program yang aktif, beragam, dan relevan bukan sekadar pengisi kalender kegiatan; ia merupakan *prime mover*—penggerak utama—yang akan mentransformasi bangunan fisik menjadi pusat kegiatan budaya yang hidup dan bernyawa. Hanya melalui program yang berkelanjutan dan berkualitas, bangunan ini dapat memenuhi perannya sebagai ruang yang tidak hanya memamerkan budaya, tetapi juga secara aktif menjaga keberlanjutan, mendorong regenerasi, dan memastikan relevansi nilai-nilai budaya lokal di tengah percepatan perubahan dan perkembangan kota Samarinda. Revitalisasi program adalah prasyarat mutlak untuk menghidupkan kembali makna dan fungsi arsitektur kebudayaan ini.

C. Lemahnya Tata Kelola dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Lemahnya sistem pengelolaan dan ketidakjelasan kebijakan pemanfaatan ruang merupakan faktor krusial yang secara langsung berkontribusi terhadap penyimpangan fungsi di kompleks Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda. Secara ideal, ruang publik budaya memerlukan kerangka tata kelola yang terarah dan komprehensif, mencakup regulasi yang secara eksplisit mendefinisikan: (1) kriteria pengguna yang berhak memanfaatkan fasilitas, (2) jenis kegiatan yang diizinkan berdasarkan kesesuaian dengan misi kebudayaan, serta (3) prosedur perizinan yang transparan, konsisten, dan mudah diakses. Kerangka semacam ini berfungsi sebagai *guardrail* operasional yang menjamin keselarasan antara aktivitas yang terjadi di dalam ruang dengan tujuan kultural pendiriannya. Tanpa fondasi manajerial yang kuat, ruang budaya rentan mengalami distorsi fungsi.

Observasi empiris di Samarinda mengungkapkan kendala administratif yang signifikan dan absennya pedoman teknis yang tegas dalam pengelolaan ruang. Tidak terdapat sistem klasifikasi atau zonasi penggunaan ruang (*space utilization classification*) yang membedakan secara jelas area mana yang diprioritaskan untuk kegiatan budaya inti, pendidikan, atau sekadar pendukung. Akibatnya, terjadi *functional drift* di mana ruang-ruang strategis—seperti aula utama atau ruang pertunjukan—dapat dialihfungsikan untuk kegiatan yang sama sekali tidak terkait budaya, seperti rapat korporat atau resepsi pernikahan komersial. Ketidaktegasan kebijakan ini menciptakan *regulatory vacuum* yang membuka peluang penyalahgunaan ruang oleh berbagai pihak, baik eksternal maupun internal dinas, tanpa mekanisme pengawasan yang efektif atau sanksi yang memadai untuk pelanggaran fungsi. Ketiadaan instrumen penegakan ini memperparah ketidakpatuhan terhadap misi budaya.

Kelemahan sistemik tidak hanya terletak pada regulasi, tetapi juga pada aspek koordinasi lintas institusi dan partisipasi komunitas. Minimnya sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah (sebagai pemangku kebijakan), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (sebagai pengelola fasilitas), serta komunitas seni, budayawan, dan lembaga pendidikan budaya setempat, menghambat terciptanya ekosistem budaya yang terintegrasi. Tidak adanya forum komunikasi rutin atau mekanisme perencanaan partisipatif menyebabkan potensi kegiatan budaya yang kaya justru sering kali berpindah ke ruang alternatif seperti sanggar swasta, kafe, atau ruang komunitas *ad hoc* yang lebih fleksibel meskipun

minim fasilitas memadai. Isolasi pengelolaan ini mencerminkan pendekatan siloed operation yang gagal memanfaatkan modal sosial dan kultural yang tersedia di masyarakat.

Dampak dari tata kelola yang lemah ini bersifat sistemik dan multidimensional. Pada tingkat fungsional, ia menyebabkan disfungsi ruang di mana fasilitas tidak dimanfaatkan sesuai potensi desainnya. Lebih dalam lagi, terjadi erosi nilai simbolik (bangunan yang semestinya menjadi representasi fisik dan kebanggaan identitas budaya lokal, berubah menjadi sekadar wadah fisik generik yang terbuka bagi segala aktivitas tanpa seleksi kuratorial. Proses ini meminggirkan fungsi kebudayaan inti dan menurunkan citra institusi sebagai otoritas budaya. Ruang kehilangan kekuatannya sebagai cultural signifier dan menjadi netral secara makna.



Gambar 2. *Bangunan Utama*

Mengatasi akar permasalahan ini memerlukan reorientasi mendasar terhadap sistem manajemen ruang. Langkah pertama adalah peninjauan ulang dan penyusunan ulang regulasi pemanfaatan ruang yang secara eksplisit berbasis fungsi kultural. Regulasi ini harus mencakup: (1) klasifikasi ruang berdasarkan sensitivitas dan prioritas kegiatan budaya, (2) kriteria kelayakan kegiatan yang jelas, (3) prosedur permohonan dan verifikasi transparan, serta (4) skema sanksi yang tegas untuk pelanggaran. Namun, regulasi saja tidak cukup. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola dalam hal perencanaan program, kurasi kegiatan, dan operasional harian. Yang tak kalah penting adalah membangun mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan budaya melalui forum tetap atau platform bersama. Hanya dengan integrasi ketiga elemen bangunan ini dapat dikembalikan posisinya sebagai ruang budaya yang strategis, bermakna, dan berdaya guna tinggi bagi komunitas.

D. Analisis Fungsionalisme Gedung Dinas Kebudayaan Dan Wisata Budaya Kota Samarinda

Dalam perspektif fungsionalisme arsitektur, efektivitas sebuah bangunan publik diukur melalui kesesuaian mutlak antara bentuk fisik, tata ruang, dan program kegiatan dengan tujuan utamanya. Bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda, sebagai cultural apparatus, secara ideal harus beroperasi sebagai mesin yang teroptimasi untuk memproduksi dan mereproduksi nilai-nilai budaya. Setiap elemen desain wajib berfungsi sebagai mekanisme pendorong perilaku kultural yang diinginkan. Fungsionalisme menolak ornamen yang berdiri sendiri. Simbol budaya seperti motif batik atau bentuk rumah adat hanya bermakna jika terintegrasi secara organik dengan aktivitas yang menghidupkannya. Tanpa kesatuan fungsi-bentuk, bangunan gagal menjadi instrumen kebudayaan yang efektif.

Observasi fungsional mengungkap diskoneksi kritis antara simbolisme arsitektural bangunan dan realitas operasionalnya. Meskipun mengadopsi elemen budaya lokal, desain tersebut tidak terhubung dengan programatik fungsional yang konsisten. Ruang auditorium dengan akustik khusus tidak digunakan untuk pertunjukan rutin, galeri dengan pencahayaan terkurasi mangkrak tanpa pameran, dan ruang workshop tanpa aktivitas pelatihan seni. Ornamen budaya menjadi sekadar façade. Dalam kerangka fungsionalis, ini adalah kesalahan struktural: simbol tidak menjadi bagian dari mesin kebudayaan, melainkan hanya tempelan pada wadah yang pasif.

Fungsionalisme menempatkan konsep affordance sebagai inti efektivitas desain. Kompleks ini gagal menciptakan cultural affordance akibat tiga diskoneksi fundamental: Pertama, zonasi ambigu mengaburkan batas antara ruang sakral (pertunjukan/pameran) dan sekuler (rapat/resepsi), menghilangkan hierarki fungsional. Kedua, fleksibilitas palsu pada desain serbaguna justru mendegradasi ruang menjadi wadah generik yang mengundang aktivitas sembarang alih-alih memprioritaskan kegiatan bertarget. Akumulasi kegagalan ini mentransformasi ruang menjadi neutral container yang perilaku penggunaannya didikte kepraktisan (akses mudah, biaya murah).



Gambar 3. Area Mess

Dalam kerangka fungsionalis radikal, lemahnya partisipasi komunitas seni bukan sekadar kesalahan manajemen, melainkan cacat desain sistemik yang mengisolasi "bahan bakar operasional". Bangunan ini mengabaikan tiga pilar integrasi: Mekanisme keterlibatan seperti ruang kolaborasi terbuka atau akses egaliter ke fasilitas tidak diwujudkan dalam tata ruang, membuat komunitas merasa sebagai tamu bukan pemilik. Infrastruktur dukungan esensial tidak hadir sebagai bagian integral desain. Alur umpan balik untuk menjembatani kebutuhan komunitas dengan program juga absen dari sistem operasional. Tanpa ketiga elemen ini, bangunan kehilangan cultural engine-nya: komunitas sebagai aktor utama justru teralienasi, mengubah potensi ruang menjadi cangkang mati yang gagal menjadi ekosistem kebudayaan. Dalam fungsionalisme, identitas bukan produk dekorasi, melainkan efek samping dari fungsi yang berjalan optimal. Ketika aula secara rutin dipakai untuk latihan teater tradisional, motif ukiran di dindingnya berubah dari dekorasi menjadi pengingat performatif. Ketika galeri menyelenggarakan pameran seni lokal setiap bulan, ornamen batik di lantai menjadi konteks aktif, bukan sekadar pola. Identitas terbentuk melalui repetisi fungsi budaya dalam ruang yang secara fisik mendukungnya. Bangunan Samarinda gagal membangun identitas karena simbol dan aktivitas terpisah.

E. Socio Technogram

Pendekatan Socio-Technogram menyoroti keterkaitan antara konfigurasi ruang, struktur sosial pengguna (sociogram), dan pola aktivitas yang terjadi di dalamnya. Ketiganya membentuk satu kesatuan yang memengaruhi cara ruang digunakan dan dimaknai. Pada kasus bangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Samarinda, aspek teknogram sudah menunjukkan potensi kuat sebagai representasi budaya lokal. Desain bangunan terinspirasi dari arsitektur rumah adat dan dihiasi ornamen batik khas daerah, menciptakan identitas visual yang sesuai dengan tujuan kulturalnya. Namun, sifat ruang yang terlalu fleksibel seperti aula serbaguna justru memudahkan terjadinya alih fungsi yang tidak relevan dengan kebudayaan.

Dari sisi sociogram, tidak terbentuk jaringan sosial yang solid dari pelaku budaya untuk menghidupkan dan mengelola ruang ini secara aktif. Ruang justru lebih banyak digunakan oleh masyarakat umum untuk acara pernikahan, pelatihan umum, atau kegiatan non-kultural lainnya, karena kurangnya kontrol dan keterlibatan komunitas budaya dalam pengelolaan.

Sementara itu, aktivogram menunjukkan minimnya kegiatan budaya yang konsisten. Aktivitas seni, pameran, atau diskusi budaya hanya terjadi sesekali dan cenderung bersifat seremonial. Hal ini menyebabkan ruang menjadi pasif dan kehilangan daya tarik sebagai pusat kebudayaan.

Dari ketiga lapisan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sinergi antara desain ruang, struktur sosial pengguna, dan aktivitas yang berlangsung menjadi penyebab utama terjadinya

penyimpangan fungsi. Pendekatan ini memperjelas bahwa revitalisasi ruang budaya tidak cukup hanya dengan memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga memerlukan strategi sosial dan program aktivitas yang terarah dan berkelanjutan.



Gambar 4. Socio Technogram

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian fungsi, minimnya aktivitas budaya, lemahnya sistem pengelolaan, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan utama dalam optimalisasi ruang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Samarinda sebagai ruang budaya publik. Meskipun secara desain fisik bangunan telah mengandung elemen representatif budaya lokal, seperti bentuk rumah adat dan ornamen batik, kekosongan aktivitas serta penggunaan ruang untuk kepentingan non-budaya telah melemahkan identitas dan makna ruang tersebut.

Revitalisasi bangunan ini memerlukan rekonfigurasi sistemik berbasis fungsionalisme. Langkah pertama adalah reprogramming ruang melalui penetapan zona utama yaitu pembagian area inti (pertunjukan/pameran/workshop) dengan spesifikasi teknis ketat dan hierarki sakral-fungsional yang jelas, mengeliminasi ambiguitas penggunaan. Strategi ini harus diperkuat dengan arsitektur perilaku berupa desain sirkulasi aksial, penanda visual, dan tata letak fasilitas yang secara subliminal mengarahkan mobilitas dan interaksi pengguna menuju aktivitas budaya target. Tantangan fleksibilitas dijawab dengan sistem manajemen berbasis data yang mengikat desain fisik dengan kalender program melalui alokasi waktu, intensitas, dan bobot kegiatan berdasarkan prioritas kebudayaan. Sinergi desain ini mengubah bangunan dari wadah pasif menjadi generator identitas kultural yang efisien sebuah mesin kebudayaan dimana bentuk fisik, pengalaman ruang, dan output simbolik menyatu dalam siklus operasional yang presisi.

5. Daftar Pustaka

- Afdholi, Amar Rizqi. 2017. "Tipomorfologi Permukiman Tepian Sungai Martapura Kota Banjarmasin." *Local Wisdom : Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal* 9(1): 33–50. doi:10.26905/lw.v9i1.1865.
- Hantono, Dedi, and Diananta Pramitasari. 2018. "Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik." *Nature: National Academic Journal of Architecture* 5(2): 85. doi:10.24252/nature.v5i2a1.
- Hidayat, Medhy Aginta. 2019. "Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern: Sejarah, Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme." *Journal of Urban Sociology* 2(1): 42. doi:10.30742/jus.v2i1.610.
- Islamiyati, Islamiyati, Suprayetno Suprayetno, and Yunita Syafitri Rambe. 2021. "Perancangan Pusat Kecantikan Dan Kesehatan Di Medan Dengan Tema Asitektur Bioklimatik Kenneth Yeang." *Jaur (Journal of Architecture and Urbanism Research)* 4(2): 170–80. doi:10.31289/jaur.v4i2.4885.
- Mustaqim, Karna, D. Rio Adiwijaya, and Ferdinand Indrajaya. 2013. "Penelitian Atas Penelitian Seni Dan Desain: Suatu Studi Kerangka Filosofis-Paradigmatis Bagi Penelitian Seni Dan Desain Visual." *Humaniora* 4(2): 995. doi:10.21512/humaniora.v4i2.3541.

- Prabowoningsih, Nida Hayu, Rufia Andisetyana Putri, Erma Fitria Rini, Prabowoningsih, Nida Hayu, Rufia Andisetyana Putri, and Erma Fitria Rini. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Dominasi Penggunaan Lahan (Studi Kasus: Kota Surakarta)." *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif* 13(2): 133. doi:10.20961/region.v13i2.21158.
- Pratiwi, Yulia. 2016. "Transformasi Fungsi Ruang Terbuka Publik Di Perkotaan Studi Kasus: Taman Pedestrian Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur." *NALARs* 15(1): 63. doi:10.24853/nalars.15.1.63-72.
- Sari, D. P. KAJIAN FUNGSI EKOLOGIS DAN ESTETIS RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN RAWAN BANJIR: Studi Kasus RTH Kawasan Pasar Segiri, Sub DAS Karang Mumus, Kota Samarinda. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 5(2), 281-288.
- Tamariska, Stirena Rossey, and Agus S. Ekomadyo. 2017. "'Place-Making' Ruang Interaksi Sosial Kampung Kota'." *Jurnal Koridor* 8(2): 172–83. doi:10.32734/koridor.v8i2.1345.
- Titisari, Ema Yunita, Joko Triwinarto Santoso, and Noviani Suryasari. 2012. "Konsep Ekologis Pada Arsitektur Di Desa Bendosari." *Review of Urbanism and Architectural Studies* 10(2): 20–31. doi:10.21776/ub.ruas.2012.010.02.3.
- Wardiningsih, Sitti, and Banni Fuadi Salam. 2019. "Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Sempadan Sungai Ciliwung Di Kawasan Kampung Pulo Dan Bukit Duri Jakarta." *NALARs* 18(1): 65–74.